

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adler, John dan Wilkinson, David, *environmental law and ethic*, Mac Milann Press, London, 1999
- Akib, Muhammad, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, PT RajaGrafindo, Jakarta 2016
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Azheri, Busyra, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- B. Ardhiwisastra, Yudha, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Bandung, Alumni bandung, 1999.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2024 Volume 38*, 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2024, Volume 15*, 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan 2024, Volume 19*, 2024
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2024, Volume 10*, 2024
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi tengah 2024, Volume 10*, 2024
- Daly, Herman, *Steady state Economics*, Island Press, Washington, DC, 1991, dalam Abdul Ghaffar dkk, *Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2023: terdepan di luar lintasan*, Jakarta: Eksekutif Nasional Walhi, 2023.
- Dobson, Andrew, *Justice and The Environment*, Oxford University Press, New York, 1998
- Dworkin, Ronald, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge, 1978, dalam Wibisana, “Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan”, *Mimbar Hukum*, Vol 29 No 2, Juni 2017.
- Dwiyanto, Agus, *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta, Ugm Press, 2024

- Fahrudin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2009
- Fajar ND, Mukti, dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Faure, Michael dan Goran Skogh, 2003, *The Economic Analysis of Environmental Policy and Law: An Introduction*, Edward Elgar, Cheltenham, dalam Andri G. Wibisana, “Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan”, *Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 2, Juni 2017
- _____, *Environmental Law and Economics*, Maastricht University, Maastricht, 2001, dalam Andri G. Wibisana, “Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan”, *Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 2, Juni 2017
- Ghaffar, Abdul, dkk, *Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2023: terdepan di luar lintasan*, Jakarta: Eksekutif Nasional Walhi, 2023.
- Finger, Matthias “Which Governance for Sustainable Development? An Organization and Institutional Perspective”, dalam Pan Mohamad Faiz, “Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016.
- Handoyono, B. Hestu Cipto, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Hatta, Mohammad, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Mutiara, 1997, hlm. 28. Dalam Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.8 No. 3 2011.
- Hermawan, Sapto, *Demokrasi Lingkungan Hidup: Konsep, Teori, dan Isu-isu Kontemporer di Indonesia*, Setara Press dan Kelompok Intrans Publishing, Malang, 2021
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

- Machmudi, Yon, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Depok, 2013
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- M Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993
- Manan, Bagir, *Beberapa Catatan atas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, FH-Unpad, Bandung, 1999
- _____, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak dan Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Jakarta, 1955
- _____, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 12. Dalam Pan Mohammad Faiz, “Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Hukum*, Oktober 2006
- Mochtar, Zainal Arifin, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta, EA Books, 2022.
- Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Nusantara, Abdul Halim G, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1998
- Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Paskarina, Caroline, Asiah, Mariatul & Madung, Otto Gusti, *Mendemonstrasikan Kesejahteraan: Mengelola Akses, Strategi, dan Kapasitas Kontrol Publik*, Penerbit PolGov, Yogyakarta, 2016.
- _____, *Berebut Kontrol atas Kesejahteraan: Kasus-kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal*, Yogyakarta, Penerbit PolGov, 2016
- Primayogha, Egi, Revisi UU Minerba: Dalam Cengkeraman Oligarki dan State Capture, dalam Ahmad Khoirul Umam (eds) *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*, Jakarta, Universitas Paramadina, 2021.
- Puspitawati, Herien, *Konsep teori dan Analisis Gender*, IPB Press, Bogor, 2013
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971
- Saleng, Abrar *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004

Schmid, J.J Von, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum, Pembangunan*, Jakarta, 1958, dalam Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004

Shomad, Abdul *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Sibuea, Hotman Pardomuan, *Politik Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2010, dalam Wahyu Nugroho, dkk, Ormas Keagamaan Jadi Korporasi: Politik Hukum di Ujung Tambang, *Jurnal Litigasi*, Vol 26 (1) April, 2025.

Sulistiyono, Adi, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, LPP dan UNS Press, Surakarta, 2008

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Syamsuddin, M. Aziz, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2021

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsan, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Cet 10, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015

Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Wardana, Agung, *Dimensi Keadilan Lingkungan dalam Karya Professor Maria Sumardjono*, dalam buku *Menelusuri Pemikiran Hukum Agraria Prof. Maria S.W Sumardjono*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2023

Wardhana, Defrio Nandi, Pratiwi, Novita Indri, Syahrini, *Desk Study Walhi: Analisis Kesenjangan Iklim Indonesia dalam Perspektif Keadilan Antargenerasi*, Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta, 2020.

Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi*, Jakarta, Djembatan, 1954

Yustika, Ahmad Erani, *Perekonomian Indonesia, Satu Dekade Pasca krisis Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2007

Jurnal

Anggraini, Dewi, Mhd Fajri, Syaifuddin Islami, Rent Seeking in the Illegal Gold Mining Business Network in West Sumatra Province (A Case Study of Sijunjung and South Solok Regencies), *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, Volum 4 (2), Juli 2023

- Astuti, Dyah Rahmi dan Wibisono, M. Yusuf, “Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2 No. 1, 2022
- Astinda, Afifudin Nur Rosyid, Wahyu Pujo Pratama, dan Muhammad Bagas Haidar, “Konflik Regulasi dan Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan”, *Jurnal USM Law Review*, Volume 7 Nomor 3, 2024
- Arizona, Yance, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.8 No. 3, 2011.
- Atsari, Ainun Syahida, dan Ike Wanusmawatie, Analisis Klientelisme dalam Pemberian Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan di Indonesia, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2025, hlm, 1324
- Baylon, Oktavioanus, “Menggagas Ideal Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam Mengelola Tambang (sebuah Refleksi Teologis)”, *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, Volume 2 Nomor 6, Juni 2025,
- Bebbington, Anthony, *et all*, “Contention and Ambiguity: Mining and the Possibilities of Development”, *Development and Change*, Vol 39, No. 6, 2008
- Benn, Vicki, “What’s Fairness Got to Do with It? Environmental Justice and the Siting of Locally Undesirable Land Uses”, *Cornell Law Review*, Vol 78, No 6, September 1993
- Bernike, Geby, Devi Ervina Nusyamsiah, Shannia Angelia Rahardjo, “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024”, *Padjadjaran Law Review*, Volume 12, Nomor 2, 2024.
- Binawan, Al. Andang dan Sebastian, Tanius, “Menim(b)ang Keadilan Eko-sosial”, *Epistema Institute, Kertas Kerja Epistema* No. 07/2012
- Bryant, Bunyan, “Environmental Justice: Issues, Policies, Solutions”, dalam Al. Andang Binawan dan Tanius Sebastian, “Menim(b)ang Keadilan Eko-Sosial”, *Kertas Kerja Epistema* No. 07/2012
- Bullard, Robert D, “Environmental Racism and Invisible Communities”, *West Virginia University, The Research Repository*, Vol. 96 No 4, June 1994
- _____, “Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters”, *Clark Atlanta University, Phylon*, Vol. 49, No. 3/4, 2001

_____, “Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality” (1990), dalam Robert R. Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice”, *Environmental Law Reporter*, Vol. 30, 2000

_____, Unequal Environmental Protection: Incorporating Environmental Justice in Decision Making, Kuehn, Robert R., “A Taxonomy of Environmental Justice”, *Environmental Law Reporter*, Vol. 30, 2000

Buru Manoe, Sumral, “Konstruksi Hak Menguasai Negara dalam Tata Laksana Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2014.

Cahyani, Adinda Agis Fitria, “Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas dalam peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024”, *Rewan Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 4 Nomor 11, September 2023.

Dalimunthe, Dermina, “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 62

Djafar, Wahyudi, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah

Elvianita, Novi, “Pentingnya Keadilan Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Politik Ekologi”, *Literacy Notes*, Vol.1, No. 2, 2023

Faiz, Pan Mohamad, “Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016

Fitriyanti, Reno, “Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi”, *Jurnal Redoks*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016

Habibi, Ahmad, “Pencemaran Lingkungan Akibat Tambang Batubara di Desa Serongga Kabupaten Kotabaru”, *Seri Publikasi Pembelajaran*, Vol. 1 No. 1 (2022): Pendidikan Lingkungan Hidup

Hakim, Ilmi, “Dampak Kebijakan Pertambangan bagi Masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara”, 2014, dalam Reno Fitriyanti, “Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi”, *Jurnal Redoks*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016,

Hidayat, Fakhruddin, F. & Firdaus, D.H, “Moderation in DSN-MUI Fatwas: Achieving Justice and Balance in the Sharia Economic System”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 15 Nomor 1, 2024, dalam Wahyu Nugroho, dkk, “Ormas Keagamaan Jadi Korporasi: Politik Hukum di Ujung Tambang”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 26 (1) April 2025.

- Kaswan, Alice, “Environmental Justice: Bridging the Gap Between Environmental Laws and Justice”, *The American University Law Review*, Vol. 47:221
- Kuehn, Robert R., “A Taxonomy of Environmental Justice”, *Environmental Law Reporter*, Vol. 30, 2000
- Kotilainen, Juha M., Lasse Petlonen, Kalle Reinikainen, Community Benefit Agreements in the Nordic mining context: Local opportunities for collaboration in Sodankyla, “ *Finland, Resources Policy*, 79 (2022),
- Langhelle, Oluf, “Sustainable Development and Social Justice: Expanding the Rawlsian Framework of Global Justice”, *Environmental Justice*, Vol. 9, No. 3, 2000, hlm. 299-300
- Mei, Dorothy, Tiffany Means, Eynn Feng, Still Digging 2025: “Tracking Global Coal Mine Proposal”, *Global Energy Monitor*, Briefing: July 2025
- Nugroho, “Ormas dan Ekonomi Politik Konsesi Tambang: Perspektif Etika dan Demokrasi”, *Jurnal Wacana Politik dan Lingkungan*, 2023
- Nugroho, Wahyu, dkk, Ormas Keagamaan Jadi Korporasi: Politik Hukum di Ujung Tambang, *Jurnal Litigasi*, Vol. 26 (1) April 2025
- Nurhayati, R, dkk, “Muhammadiyah Sebagai Gerakan Sosial dan Ekonomi (Studi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sinjai)”, *Journal of Islamic Education and Social Science*, Vol 2 No 1, 2023
- Pambudhi, Hario Danang dan Ramadayanti, Ega, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7 No. 2, 2021
- Pedersen, Ole W, “Environmental Principles and Environmental Justice”, *Environmental Law Review Forthcoming*, Vol. 12 No. 1, 2010
- Priyanta, Maret, “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010
- Rizki Ridwansyah, “Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia”, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Volume 1, Nomor 1, September 2024.
- Safitri, Myrna A, “Hak Menguasai Negara di Kawasan Hutan: Beberapa Indikator Menilai Pelaksanaanya”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 1 Issue. 2, Desember 2014

- Salsabila, Ananda Putri, “Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 55 Nomor 1, 2025.
- Septiana, Annisa, dkk, “Kajian Kritis tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan Berdasarkan Perspektif Teori Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Studi Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2025.
- Suprayogo, Imam, “Telaah Peran Organisasi Keagamaan dalam Pengembangan Pendidikan, Sosial, dan Dakwah”, *Jurnal El-Harakah*, Vol. 5, No. 2, Juli-Oktober, 2003.
- Surya, T. Ade dan Suryawan, Audry Amaradyaputri, “Pelibatan Ormas Keagamaan dalam Pengelolaan Tambang”, *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 16. 15/Pusaka/Agustus 2024
- Swedish Ministry of Enterprise, Energy and Communications, Sweden’s Minerals Strategy, For sustainable use of Sweden’s mineral resources that creates growth throughout the country, N2013.06
- Tandori, Murdianti, Caritas Woro, Implikasi Hukum dan Sosial Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam Sektor Pertambangan Studi atas Pasal 83A Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 10 Nomor 1, Juni 2025
- Temper, Leah, dkk, “The Global Environmental Justice Atlas (EJAtlas): ecological distribution, conflicts as forces for sustainability”, *Sustainability Science*, April 2018.
- Walker, Gordon. “Beyond Distribution and Proximity: Exploring the Multiple Spatialities of Environmental Justice”, *Antipode*, 41(4), 2009.
- Wardana, Agung, “Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 3 No. 2, 2013
- _____, “Governing Through Courts? Law and the Political-Economy of Climate Change Litigation in Indonesia”, *VRÜ Verfassung Und Recht in Übersee*, 56 (2), 2023
- Wardhani, Nurwidya Kusuma, Tulus M. Lumba Gaol, Taufiqurrohma Syahuri, Nurwidya, “Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *JRP: Jurnal Relasi Publik*, Vol. 2 No 1 Februari 2024.
- Wibisana, Andri G, “Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan”, *Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 2, Juni 2017

Zakie, Mukmin, “Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber daya Agraria”, *Jurnal Hukum*, No. 29 Vol. 12, 2005.

Prosiding dan Makalah

Afinnas, Muhammad Agil Aufa, Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan, Prosiding Seminar Hukum Aktual, Problematika Kemudahan Proyek Strategis Nasional: Konflik Norma dan Tantangan Kesejahteraan

Basah, Sjachran, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi”, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1995

Muhlas, Nur Rizkiya, Amirullah, Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK dan IUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Ormas Kegamaan, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2024, Kebijakan Pengelolaan Pertambangan: Perspektif Transdental, 2024

Purwendah, Elly Kristiani, Konstitusionalisasi sebagai Keadilan Eko-Sosial berciri Ekosentrisme, Prosiding Seminar Nasional hukum dan Ilmu Sosial Ke-2, dengan judul Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa, 2018

Renda, Fransiskus Xaerius, Kebahagiaan dalam Utilitarianisme John Stuart Mill, Prosiding Seminar Nasional Filsafat dan Teologi: Etika dan Persoalan Moral Kontemporer di Indonesia, Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Volume 1 Nomor 1 2023.

Tesis dan Desertasi

Juwita, Rena, Analisis Yuridis dan Pemanfaatan Aset yang Berasal dari PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) Oleh Kontraktor Pasca Perubahan Menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Operasi Produksi”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018

Sari, Ni Luh Ayu Permana, Perlindungan Hukum Atas Pemegang Izin Usaha Pertambangan di Era Otonomi Daerah, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014

Z. Titahelu, Ronald, Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Utuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Disertasi, PPS-UNAIR, Surabaya, 1993.

Internet

Admin, CNN Indonesia, *Daftar Ormas Keagamaan yang Bisa Garap Tambang di RI*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240602083414-20-1104771/daftar-ormas-keagamaan-yang-bisa-garap-tambang-di-ri>, diakses pada 21/Januari/2025.

Admin, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, *Sekilas Sejarah Matakin*, <https://matakin.or.id/category/berita/read/-sekilas-sejarah-matakin>, diakses pada 22 Januari 2025

Admin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Siaran Pers Nomor: 013.Pers/04/SJI/2025 Tanggal: 18 Februari 2025, *RUU Minerba Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang*, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruu-minerba-resmi-disahkan-menjadi-undang-undang> diakses pada 19 Maret 2025

Admin Buddhazine, *Inilah Contoh Pemberdayaan Ekonomi Umat Buddha*, tersedia di <https://buddhazine.com/inilah-contoh-pemberdayaan-ekonomi-umat-buddha/>, diakses pada 27 Juni 2025

Admin Procurement, *Cara Negara Skandinavia Menerapkan Pengadaan Ramah Lingkungan*, tersedia di <https://procurement.id/2025/01/30/cara-negara-skandinavia-menerapkan-pengadaan-ramah-lingkungan/>, diakses pada 09 September 2025

Andi, Ferdian, *Izin Tambang dan Mandat Ormas Keagamaan*, tersedia di <https://www.tempo.co/kolom/risiko-izin-tambang-ormas-keagamaan-22803>, diakses pada 01 Juli 2025

Arif, Ahmad, *Indonesia Sumbang 58,2 Persen Perusakan Hutan Tropis akibat Pertambangan*, tersedia di <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/13/indonesia-sumbang-582-persen-perusakan-hutan-tropis-akibat-pertambangan>, diakses pada 20 Juni 2025.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Masyarakat Adat di Tahun Politik, di Tengah Hukum Represif & Cengkraman Oligarki*, tersedia di <https://aman.or.id/files/publication-documentation/39048CATAHU%20AMAN%202023%20-%20LYTD.pdf>, diakses pada 12 Agustus 2025

_____, *Catatan Akhir Tahun 2024 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Transisi Kekuasaan & Masa Depan Masyarakat Adat*, tersedia di <https://www.aman.or.id/publication-documentation/304>, diakses pada 12 Agustus 2025

Cahyono, Eko, *Wajah Ganda Agama: Antara Anugerah dan Bencana*, tersedia di <https://nasional.sindonews.com/read/1392299/18/wajah-ganda-agama-antara-anugerah-dan-bencana-1717819586?showpage=all>, diakses pada 30 Juli 2025

Charles, Maju Bersama Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera, tersedia di <https://beritakaltim.co/2023/07/16/maju-bersama-perusda-pertambangan-bara-kaltim-sejahtera/>, diakses pada 08 September 2025

Climate Action Tracker, Indonesia, tersedia di <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>, di akses pada 13 Agustus 2025

DA, Adt Thead, 5 *Catatan YLBHI untuk Perubahan Keempat UU Minerba*, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-ylbhi-untuk-perubahan-keempat-uu-minerba-lt67b6bd5b10735/?page=3>, diakses pada 01 Juli 2025.

_____, *3 Peran Penting Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-peran-penting-partisipasi-publik-dalam-proses-legislasi-lt66a8509c12e8d/?page=2>, diakses pada 07 September 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, tersedia di <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-periodik/detail/804>, diakses pada 04 Juni 2025.

_____, *Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam Rangka Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, tersedia di <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-periodik/detail/804>, diakses pada 16 Juni 2025

EPA, *Environmental Justice: Learn About Environmental Justice*, tersedia di <https://www.epa.gov/environmentaljustice/learn-about-environmental-justice>, diakses pada 25/01/2025

Faturahman, Andi Adam, *NU dan Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas, Pegiat Singgung Soal Kemaslahatan*, tersedia di <https://www.tempo.co/politik/nu-dan-muhammadiyah-terima-izin-tambang-ormas-pegiat-singgung-soal-kemaslahatan-35557>, diakses pada 10/11/2024.

Fajriadi, Alif Ilham, *LPEM UI dan Greenpeace Luncurkan Makalah Kebijakan Coal Lock-In, Bahas Solusi DEkarbonisasi*, tersedia di <https://www.tempo.co/lingkungan/lpem-ui-dan-greenpeace-luncurkan>

[makalah-kebijakan-coal-lock-in-bahas-solusi-dekarbonisasi-109278](#), diakses pada 31 Juli 2025

Gultom, Indra, *NU buat PT BUMN untuk kelola tambang hingga 26.000 Ha di Kaltim*, tersedia di <https://www.antaraneews.com/berita/4563098/nu-buat-pt-bumn-untuk-kelola-tambang-hingga-26000-ha-di-kaltim>, diakses pada 20 Januari 2025.

Greenpeace, *Pengesahan Revisi UU Minerba: Langkah Mundur bagi Transisi Energi dan Keadilan Lingkungan*, tersedia di <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/62259/penge-sahan-revisi-uu-minerba-langkah-mundur-bagi-transisi-energi-dan-keadilan-lingkungan/>, diakses pada 31 Juli 2025

Indonesia Parliamentary Center, *Revisi UU Minerba*, tersedia di <https://openparliament.id/2025/03/04/ruu-tentang-perubahan-keempat-undang-undang-nomor-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-mineral-dan-batubara/>, diakses pada 04 Juni 2025

Indonesia Corruption Watch, *Rencana Revisi Terbaru UU Minerba: Menambah Pemburu Rente Baru dan Menyuburkan Tata Kelola Kolusif di Sektor Ekstraktif*, tersedia di <https://antikorupsi.org/id/rencana-revisi-terbaru-uu-minerba-menambah-pemburu-rente-baru-dan-menyuburkan-tata-kelola-kolusif>, diakses pada 02 Juli 2025

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri, *Pembinaan Ekonomi Umat, Erman Zaruddin Jelaskan Peran Ormas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, tersedia di <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pembinaan-ekonomi-umat-erman-zaruddin-jelaskan-peran-ormas-dalam-pemberdayaan-ekonomi-umat>, diakses pada 27 Juni 2025

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Daftar Aras Nasional*, tersedia di <https://sindak.kemenag.go.id/urusan-agama/aras>, diakses pada 21 Januari 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *TPK terkait Kerjasama Pengangkutan Batubara pada BUMD Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*, tersedia di <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-terkait-kerjasama-pengangkutan-batubara-pada-bumd-milik-pemerintah-provinsi-sumatera-selatan>, diakses pada 08 September 2025

Lestari, Intan, *Jatah Tambang untuk Ormas: Pertanyaan Moral dan Sinyal Buruk Pencegahan Krisis Iklim*, tersedia di <https://mongabay.co.id/2024/06/19/jatah-tambang-untuk-ormas-pertanyaan-moral-dan-sinyal-buruk-pencegahan-krisis-iklim/>, diakses pada 09 September 2025

- Mardatila, Ani, *Kebut Aturan Tambang Masuk Kampus*, tersedia di <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20250127/Kebut-Aturan-Tambang-Masuk-Kampus/>, diakses pada 07 September 2025
- Maulana, Irfan, *Ingatkan Ormas Keagamaan: Hati-hati, Tambang Biang Masalah*, tersedia di <https://mongabay.co.id/2024/06/03/ingatkan-ormas-keagamaan-hati-hati-tambang-biang-masalah/>, diakses pada 30 Juli 2025
- Muliawati, Firda Dwi, *Dapat Jatah IUP Tambang dari Jokowi, Ini Daftar Ormas Keagamaan di RI*, tersedia di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240602154642-4-543129/dapat-jatah-iup-tambang-dari-jokowi-ini-daftar-ormas-keagamaan-di-ri>, diakses pada 20 Januari 2025
- Mulyasari, Diana, *Sifat Nirlaba Ormas Keagamaan dan Konsesi Pertambangan*, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-nirlaba-ormas-keagamaan-dan-konsesi-pertambangan-lt66c41521e8cd6/>, diakses pada 26 Juni 2025
- Michella, Widya, *Soal Kelola Tambang, Walubi Mengaku Belum Ditawari Pemerintah*, tersedia di <https://nasional.sindonews.com/read/1425557/15/soal-kelola-tambang-walubi-mengaku-belum-ditawari-pemerintah-1722312424>, diakses pada 22/01/2025.
- Mohammad Faiz, Pan, *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, tersedia di <https://panmohamadfaiz.com/2006/10/08/penafsiran-konsep-penguasaan-negara/>, diakses pada 22 Mei 2025
- Nasar, M Fuad, *Ormas Keagamaan Benteng Keutuhan Bangsa*, <https://kemenag.go.id/opini/ormas-keagamaan-benteng-keutuhan-bangsa-4j7wW>, diakses pada 21/01/2025.
- Nathania, Kezia Dwina, *Guru Besar UGM: Ada Potensi Moral Hazard jika Kampus Kelola Tambang*, tersedia di <https://ugm.ac.id/id/berita/guru-besar-ugm-ada-potensi-moral-hazard-jika-kampus-kelola-tambang/>, diakses pada 12 Agustus 2025
- Nur, Mochammad Fajar, *Izin Tambang Ormas Keagamaan Menyandera Nalar Kritis Organisasi*, tersdia di <https://tirto.id/izin-tambang-ormas-keagamaan-menyandera-nalar-kritis-organisasi-gZgl>, diakses pada 30 Juli 2025
- Nugroho, Wahyu, *Runtuhnya Marwah Perguruan Tinggi sebagai Entitas Bisnis Tambang*, tersida di <https://www.hukumonline.com/berita/a/runtuhnya-marwah-perguruan-tinggi-sebagai-entitas-bisnis-tambang-lt67a5a464cd853/?page=2>, diakses pada 31 Juli 2025

- Nurdifa, Afiffah Rahmah & Hidayatullah, Mochammad Ryan, *Kontroversi Revisi UU Minerba: Dikebut Semalam, Kampus Kecipratan Konsesi Tambang*, tersedia di <https://ima-api.org/detail/news/mining/kontroversi-revisi-uu-minerba-dikebut-semalam-kampus-kecipratan-konsesi-tambang>, diakses pada 02 Juli 2025
- Perdana, Aditya Putra, *Privilese Izin Tambang bagi Ormas Keagamaan Terus Digugat*, tersedia di <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/03/privilese-izin-tambang-bagi-ormas-keagamaan-disebut-sarat-kepentingan>, diakses pada 01 Juli 2025
- Patoni, *Ketua Umum PBNU Angkat Bicara soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan*, tersedia di <https://www.nu.or.id/nasional/ketua-umum-pbnu-angkat-bicara-soal-konsesi-tambang-untuk-ormas-keagamaan-RXbOF>, diakses pada 10 November 2024
- Prayudha, Widodo Suyanto Galuh, Menteri Investasi sebut akan selektif beri IUP kepada ormas keagamaan, tersedia di <https://bali.antaranews.com/berita/347412/menteri-investasi-sebut-akan-selektif-beri-iup-kepada-ormas-keagamaan>, diakses pada 08 September 2025
- Putri, Eka Alisa, *9 Ormas Hindu Terbesar di Indonesia*, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-018201573/9-ormas-hindu-terbesar-di-indonesia?page=all>, diakses pada 21 Januari 2025.
- Pushep, *Tak Sembarang Ormas Bisa Kelola Tambang*, tersedia di <https://pushep.or.id/tak-sembarang-ormas-bisa-kelola-tambang/>, diakses pada 08 September 2025
- Rachim, Akmaluddin, *Polemik Revisi UU Minerba*, tersedia di <https://www.kompas.id/artikel/polemik-revisi-uu-minerba>, diakses pada 22 Juli 2025
- Rahma, Andita, *Jatam Nasional Catat ada 45 Konflik Tambang Sepanjang 2020*, tersedia di <https://www.tempo.co/politik/jatam-nasional-catat-ada-45-konflik-tambang-sepanjang-2020-545633>, diakses pada 30 Juni 2025.
- Rahmad, Kejati Kaltim tahan tersangka baru kasus korupsi perusda pertambangan tersedia di https://kaltim.antaranews.com/berita/232725/kejati-kaltim-tahan-tersangka-baru-kasus-korupsi-perusda-pertambangan?utm_source=chatgpt.com, di akses pada 08 September 2025
- Ramadanty, Sabrina, *Miliki Cadangan Batubara 31,7 Miliar Ton, Eksplorasi Indonesia Masih Rendah*, tersedia di <https://industri.kontan.co.id/news/miliki-cadangan-batubara-317-miliar-ton-eksplorasi-indonesia-masih-rendah>, diakses pada 26 Juni 2025

Razi, Muhammad Fahrul, *Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kalimantan Timur*, tersedia di <https://osf.io/preprints/osf/ea65p>, diakses pada 04 Juli 2025

Rizqa, Hasanul, *Dua Organisasi Besar Nasrani Kompak Soal Tambang untuk Ormas*, tersedia di <https://news.republika.co.id/berita/sen2qr458/dua-organisasi-besar-nasrani-kompak-soal-tambang-untuk-ormas>, diakses pada 21 Januari 2024

Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon, *Komitmen dalam NDC*, tersedia di <https://karbon.ditjenppi.org/faq-iklim-dan-karbon/komitmen-dalam-ndc>, diakses pada 13 Agustus 2025

Safitri, Belinda, *Indonesia Pimpin Ekspansi Tambang Batu Bara di Tengah Krisis Iklim*, tersedia di <https://wartaekonomi.co.id/read577507/indonesia-pimpin-ekspansi-tambang-batu-bara-di-tengah-krisis-iklim>, diakses pada 13 Agustus 2025

Safitri, Eva, *Muhammadiyah Bentuk 2 Perusahaan untuk Kelola Tambang, Gandeng Para Ahli*, tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-7535584/muhammadiyah-bentuk-2-perusahaan-untuk-kelola-tambang-gandeng-para-ahli>, diakses pada 19 Januari 2024.

Sekretariat Jenderal DPR RI, *Rapat Paripurna DPR RI Sahkan RUU Minerba Jadi Undang-Undang*, tersedia di <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/54273/t/Rapat+Paripurna+DPR+RI+Sahkan+RUU+Minerba+Jadi+Undang-Undang>, diakses pada 20 Januari 2025

Shabrina, Dinda, *Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Cara DPR Kebut Revisi UU Minerba: Akrobat Konstitusi*, tersedia di <https://www.tempo.co/ekonomi/koalisi-masyarakat-sipil-kritik-cara-dpr-kebut-revisi-uu-minerba-akrobat-konstitusi-1196783>, diakses pada 22 Juli 2025

Soyland Mona dkk, *Norway Mining 2025*, tersedia di <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/mining-2025/norway?utm>, diakses pada 09 September 2025

Sulistiowati, Tri, *Revisi UU Minerba Tak Penuhi Syarat Formil*, tersedia di <https://industri.kontan.co.id/news/revisi-uu-minerba-tak-penuhi-syarat-formil>, diakses pada 01 Juli 2025

Susilo, Nina & Wulan, Mawar Kusuma, *Kenapa Hak Ormas Kelola Tambang Menuai Kritik?*, tersedia di <https://www.kompas.id/artikel/kenapa-hak-ormas-kelola-tambang-menuai-kritik>, diakses pada 02 Juli 2025

Sutrisna, Tri dan Krisiandi, *Respons PBNU, Muhammadiyah, PGI, dan PHDI soal Izin Kelola Tambang untuk Ormas*, tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/09333561/respons-pbnu-muhammadiyah-pgi-dan-phdi-soal-izin-kelola-tambang-untuk-ormas?page=all>, diakses pada 21 Januari 2025.

Tanahair.net, *Indonesia Pimpin Ekspansi Tambang Batu Bara di Asia Tenggara, Dapat Perburuk Krisis Iklim*, tersedia di <https://tanahair.net/id/indonesia-pimpin-ekspansi-tambang-batu-bara-di-asia-tenggara-dapat-perburuk-krisis-iklim/>, diakses pada 13 Agustus 2025

The Conversation, *Izin Tambang untuk ormas keagamaan: lebih banyak manfaat atau mudarat?* tersedia <https://theconversation.com/izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-lebih-banyak-manfaat-atau-mudarat-232385>, pada tanggal 08 September 2025

Tim Penulis Hukumku, *Fakta Menarik Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas*, tersedia di <https://www.hukumku.id/post/fakta-iup-ormas>, diakses pada 23 Juli 2025

Triono, Aru Lego, *PBNU Bangun 250 Badan Usaha untuk Pemberdayaan Ekonomi Nahdliyin di Abad kedua*, tersedia di <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-bangun-250-badan-usaha-untuk-pemberdayaan-ekonomi-nahdliyin-di-abad-kedua-4YwNI>, diakses pada 27 Juni 2025

Trisna, Ni Kadek, dkk, *Kronologi IUP untuk Ormas Keagamaan, Semua Bermula Janji Jokowi kepada NU pada 2021: Saya Pastikan yang Gede*, <https://www.tempo.co/politik/kronologi-iup-untuk-ormas-keagamaan-semua-bermula-janji-jokowi-kepada-nu-pada-2021-saya-pastikan-yang-gede-52675>, diakses pada 19 Maret 2025

Ulinuha, M Taufiq, *Muhadjir Effendy Ungkap Strategi Muhammadiyah Mengelola Konsesi Tambang: Tak Terburu-buru, Fokus Persiapan!*, tersedia di: <https://pwmjateng.com/muhadjir-effendy-ungkap-strategi-muhammadiyah-mengelola-konsesi-tambang-tak-terburu-buru-fokus-persiapan/>, diakses pada 10 November 2024.

_____, *Penataan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan*, tersedia di <https://pwmjateng.com/penataan-badan-usaha-milik-muhammadiyah-bumm-untuk-meningkatkan-produktivitas-dan-pendapatan/>, diakses pada 19 Januari 2025

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), *Menuju 2 Tahun UU Minerba: Puluhan Warga Dikriminalisasi Jutaan Hektar Lahan Dijarah*, tersedia di <https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>, diakses pada 30 Juni 2025

_____, Pertambangan Bukan Tugas Utama Ormas Keagamaan, tersedia di <https://walhintb.org/pertambangan-bukan-tugas-utama-ormas-keagamaan/?privacy=updated>, diakses pada 08 September 2025

Walubi, *Majelis Walubi*, tersedia di <https://www.walubi.or.id/majelis-2/majelis/>, diakses pada 22 Januari 2024

Wardah, Fathiyah, *UU Minerba Disahkan! UMKM, Ormas Keagamaan Diprioritaskan Dapat Izin Tambang*, tersedia di <https://www.voaindonesia.com/a/uu-minerba-disahkan-umkm-ormas-keagamaan-diprioritaskan-dapat-izin-tambang/7979197.html>, diakses pada 02 Juli 2025

Wardana, Agung, *Hilangnya Partisipasi Masyarakat pada Perubahan UU Minerba*, tersedia di <https://mongabay.co.id/2020/06/19/hilangnya-partisipasi-masyarakat-pada-perubahan-uu-minerba/>, diakses pada 22/07/2025

World Energy Data, *Industri mining in Indonesia accounts for 45% of global tropical deforestasi*, tersedia https://www.worldenergydata.org/industrial-mining-in-indonesia-accounts-for-45-of-global-tropical-deforestation/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 30 Juni 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 116.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Lembaran Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 89

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-I/2003, tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi No 001-021- 022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVIII/2020, Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara